



FILSAFAT ADMINISTRASI PUBLIK



Dr. Tris Dina Susanti, S.Sos., M.Si.

**FILSAFAT
ADMINISTRASI PUBLIK**

FILSAFAT ADMINISTRASI PUBLIK

Dr. Tris Dina Susanti, S.Sos., M.Si.



FILSAFAT ADMINISTRASI PUBLIK

Penulis:

Dr. Tris Dina Susanti, S.Sos., M.Si.

Editor:

Adi Junadi, S.I.Kom., M.I.Kom.
Atef Fahrudin, S.I.Kom., M.I.Kom.

Layouter :

Tim Kreatif PRCI

Cover:

Rusli

Cetakan Pertama : November 2024

Hak Cipta 2024, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia

ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website : www.rcipress.rcipublisher.org

E-mail : rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2024 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I – : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2024
; 15,5 x 23 cm
ISBN 978-623-8750-92-4

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan Buku dengan judul Filsafat Administrasi Publik sesuai yang ditargetkan.

Buku ini membahas berbagai aspek filsafat administrasi publik, mulai dari pendahuluan, teori-teori mendasar, hingga tantangan di era digital. Penekanan pada studi kasus dan aplikasi dalam bab terakhir dirancang untuk membantu pembaca memahami bagaimana teori filsafat dapat diterapkan dalam konteks nyata, khususnya dalam administrasi publik di Indonesia. Dengan pendekatan sistematis dan integratif, buku ini diharapkan menjadi panduan yang bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, dan praktisi.

Kami menyadari bahwa Buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan buku ini.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Buku ini dari awal sampai akhir. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi segala usaha kita. Amin.

November 2024, Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB 1 PENDAHULUAN FILSAFAT ADMINISTRASI PUBLIK	1
A. Definisi dan Ruang Lingkup Filsafat	1
B. Hubungan Filsafat dengan Administrasi Publik	4
C. Urgensi Filsafat dalam Kajian Administrasi Publik	7
 BAB 2 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PEMIKIRAN ADMINISTRASI PUBLIK	 10
A. Pemikiran Administrasi Publik di Era Klasik	10
B. Administrasi Publik dalam Perspektif Modern	13
C. Perkembangan Administrasi Publik di Era Kontemporer	16
 BAB 3 ONTOLOGI ADMINISTRASI PUBLIK	 20
A. Konsep Dasar Ontologi dalam Administrasi Publik	20
B. Peran Nilai-Nilai Ontologis dalam Kebijakan Publik	25
 BAB 4 EPISTEMOLOGI ADMINISTRASI PUBLIK	 29
A. Sumber Pengetahuan dalam Administrasi Publik	29
B. Metodologi Penelitian Administrasi Publik	32
C. Validitas dan Objektivitas Pengetahuan Administrasi Publik	 35
 BAB 5 AKSIOLOGI DALAM ADMINISTRASI PUBLIK	 38
A. Nilai dan Etika dalam Administrasi Publik	38
B. Keputusan Publik yang Berbasis Moral	40
C. Implementasi Aksiologi dalam Kebijakan Publik	43
 BAB 6 TEORI-TEORI ADMINISTRASI PUBLIK	 47
A. Teori Administrasi Klasik	47
B. Teori Administrasi Humanistik	50
C. Teori Administrasi Modern dan Postmodern	52

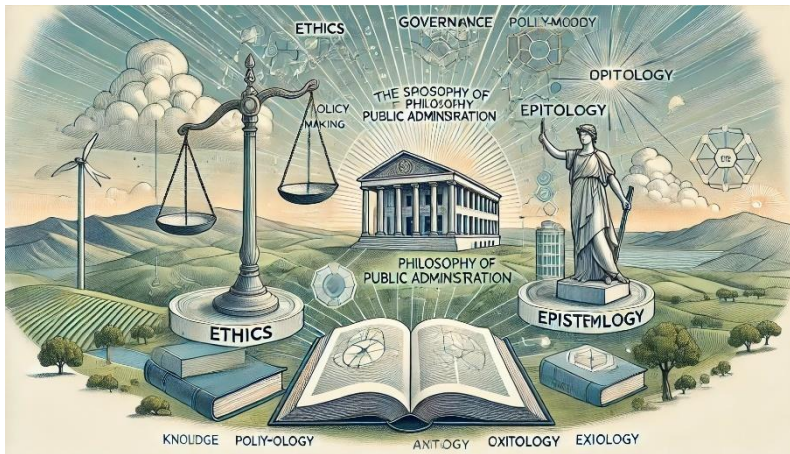
BAB 7 FILSAFAT ADMINISTRASI PUBLIK DAN DEMOKRASI	55
A. Demokrasi dalam Administrasi Publik	55
B. Partisipasi Masyarakat sebagai Landasan Filosofis	58
 BAB 8 KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT	64
A. Filosofi Dasar Kebijakan Publik	64
B. Dinamika Perumusan Kebijakan	68
C. Evaluasi Kebijakan Publik dari Perspektif Filosofis	71
 BAB 9 TANTANGAN FILSAFAT ADMINISTRASI PUBLIK DI ERA DIGITAL	74
A. Transformasi Digital dalam Administrasi Publik	74
B. Etika Administrasi di Era Teknologi	77
C. Masa Depan Filsafat Administrasi Publik Dampak AI terhadap Stabilitas Politik dan Demokratisasi	80
 BAB 10 STUDI KASUS DAN APLIKASI FILSAFAT ADMINISTRASI PUBLIK	83
A. Studi Kasus: Kebijakan Publik yang Berbasis Nilai	83
B. Penerapan Filsafat dalam Pengambilan Keputusan Publik	86
C. Pembelajaran dari Kasus Administrasi Publik di Indonesia	90
 DAFTAR PUSTAKA	93
PROFIL PENULIS	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Ilustrasi Ruang Lingkup Filsafat	1
Gambar 2 Ilustrasi Perkembangan Pemikiran Administrasi Publik	10
Gambar 3 Ilustrasi Konsep Dasar Ontologi Administrasi Publik	20
Gambar 4 Ilustrasi Epistemologi Administrasi Publik	29
Gambar 5 Ilustrasi Aksiologi Administrasi Publik	38
Gambar 6 Ilustrasi Teori-Teori Administrasi Publik	47
Gambar 7 Ilustrasi Landasan Fiolosfis dalam Administrasi Publik	55
Gambar 8 Ilustrasi Filosofi Dasar Kebijakan Publik	64
Gambar 9 Ilustrasi Transforasi Digital dalam Administrasi Publik	74
Gambar 10 Ilustrasi Studi Kasus Filsafat Administrasi Publik	83

BAB 1

PENDAHULUAN FILSAFAT ADMINISTRASI PUBLIK



Gambar 1 Ilustrasi Ruang Lingkup Filsafat

A. Definisi dan Ruang Lingkup Filsafat

Filsafat, sebagai disiplin ilmu yang telah berkembang selama berabad-abad, memiliki peran fundamental dalam membentuk cara pandang manusia terhadap dunia dan dirinya sendiri. Secara etimologis, kata "filsafat" berasal dari bahasa Yunani "philosophia," yang berarti "cinta akan kebijaksanaan." Dalam konteks akademik, filsafat didefinisikan sebagai studi sistematis mengenai pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa.

1. Definisi Filsafat

Menurut K. Bertens dalam bukunya "Filsafat Barat Kontemporer" (Bertens, 2019), filsafat adalah upaya manusia untuk memahami secara mendalam hakikat realitas, kebenaran, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan. Filsafat tidak hanya mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan spesifik, tetapi juga berusaha memahami cara pertanyaan tersebut muncul dan bagaimana jawaban dapat ditemukan.

Sementara itu, dalam "Pengantar Filsafat" oleh J. Sudarminta (Sudarminta, 2020), filsafat dijelaskan sebagai refleksi kritis dan rasional mengenai berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk moralitas, estetika, politik, dan ilmu pengetahuan. Sudarminta menekankan bahwa filsafat berfungsi sebagai landasan bagi disiplin ilmu lainnya dengan menyediakan kerangka berpikir yang logis dan sistematis.

2. Ruang Lingkup Filsafat

Ruang lingkup filsafat mencakup berbagai cabang yang masing-masing fokus pada aspek tertentu dari realitas dan pemikiran manusia. Beberapa cabang utama filsafat antara lain:

- a. **Metafisika:** Studi tentang hakikat realitas dan eksistensi. Metafisika membahas pertanyaan mengenai apa yang ada dan bagaimana sesuatu itu ada. Misalnya, apakah realitas terdiri dari materi saja, atau ada entitas non-material seperti jiwa atau Tuhan?
- b. **Epistemologi:** Cabang filsafat yang mempelajari hakikat dan lingkup pengetahuan. Epistemologi mengeksplorasi sumber, batas, dan validitas pengetahuan manusia. Pertanyaan seperti "Apa itu pengetahuan?" dan "Bagaimana kita mengetahui sesuatu?" menjadi fokus dalam epistemologi.
- c. **Etika:** Studi tentang nilai moral dan prinsip yang menentukan perilaku benar atau salah. Etika membahas konsep seperti kebaikan, kewajiban, dan keadilan, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
- d. **Logika:** Cabang yang mempelajari prinsip-prinsip penalaran yang valid. Logika membantu dalam membedakan argumen yang sah dari yang tidak, serta memastikan konsistensi dalam proses berpikir.
- e. **Estetika:** Studi tentang keindahan, seni, dan apresiasi estetis. Estetika mengeksplorasi pertanyaan mengenai apa yang membuat sesuatu indah dan bagaimana kita menilai karya seni.

- f. **Filsafat Politik:** Cabang yang membahas konsep-konsep seperti kekuasaan, pemerintahan, hak, dan kebebasan. Filsafat politik mengevaluasi dasar-dasar legitimasi pemerintahan dan hubungan antara individu dengan negara.
- g. **Filsafat Bahasa:** Studi tentang hakikat, asal-usul, dan penggunaan bahasa. Cabang ini mengeksplorasi bagaimana bahasa mempengaruhi pemikiran dan komunikasi manusia.

3. Peran Filsafat dalam Ilmu Pengetahuan

Filsafat memiliki peran krusial dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, filsafat ilmu (philosophy of science) mengevaluasi dasar-dasar metodologis dan epistemologis dari ilmu pengetahuan. Dalam "Filsafat Ilmu: Perspektif Historis dan Kontemporer" oleh A. Setiawan (Setiawan, 2021), dijelaskan bahwa filsafat ilmu membantu ilmuwan memahami asumsi-asumsi yang mendasari metode ilmiah dan implikasi filosofis dari temuan ilmiah.

Selain itu, filsafat berperan dalam mengkritisi dan merefleksikan implikasi etis dari penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya, dalam bidang bioteknologi, filsafat bioetika mengevaluasi isu-isu moral terkait rekayasa genetika, kloning, dan penelitian sel punca.

4. Filsafat dan Administrasi Publik

Dalam konteks administrasi publik, filsafat menyediakan kerangka konseptual untuk memahami dan mengevaluasi prinsip-prinsip dasar yang mendasari praktik pemerintahan dan pelayanan publik. Menurut M. Thoha dalam "Filsafat Administrasi Publik" (Thoha, 2022a), penerapan filsafat dalam administrasi publik membantu dalam:

- a. **Mengevaluasi Nilai dan Etika:** Filsafat membantu administrator publik dalam menilai nilai-nilai etis yang harus dipegang dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan.

- b. **Memahami Hakikat Kekuasaan dan Kewenangan:** Melalui filsafat politik, administrator dapat memahami sumber dan legitimasi kekuasaan, serta batas-batas kewenangan dalam konteks demokrasi.
- c. **Mengembangkan Kebijakan yang Berbasis Pengetahuan:** Epistemologi membantu dalam memastikan bahwa kebijakan publik didasarkan pada pengetahuan yang valid dan relevan, bukan sekadar asumsi atau opini.

Kesimpulan

Filsafat, dengan berbagai cabangnya, menawarkan alat dan kerangka berpikir yang esensial untuk memahami berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang administrasi publik. Dengan menerapkan pendekatan filosofis, para profesional di bidang administrasi publik dapat mengembangkan kebijakan dan praktik yang lebih reflektif, etis, dan efektif dalam melayani masyarakat.

B. Hubungan Filsafat dengan Administrasi Publik

Filsafat dan administrasi publik merupakan dua disiplin yang berbeda dalam fokus dan pendekatannya. Namun, keduanya memiliki hubungan yang erat, terutama dalam hal dasar pemikiran, kerangka konsep, dan panduan untuk pengambilan keputusan. Filsafat memberikan landasan untuk memahami nilai, etika, dan konsep-konsep fundamental yang menjadi dasar administrasi publik. Di sisi lain, administrasi publik menggunakan wawasan filosofis ini untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan melayani masyarakat.

1. Peran Filsafat dalam Administrasi Publik

Filsafat berfungsi sebagai landasan konseptual bagi administrasi publik dalam berbagai aspek, yaitu:

a. Pemahaman Ontologis Administrasi Publik

Ontologi, cabang filsafat yang membahas hakikat realitas, memberikan kerangka untuk memahami sifat dasar administrasi publik. Administrasi publik tidak hanya dipandang sebagai organisasi atau sistem, tetapi sebagai institusi yang berfungsi

untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Thoha (Thoha, 2022) dalam bukunya *Filsafat Administrasi Publik* menjelaskan bahwa pemahaman ontologis membantu administrator publik untuk mengenali hakikat kekuasaan, peran pemerintah, dan hubungan antara negara dan masyarakat. Dengan demikian, ontologi memungkinkan administrasi publik untuk mendefinisikan tujuan utamanya: pelayanan kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai universal.

b. Epistemologi dalam Administrasi Publik

Epistemologi, studi tentang pengetahuan, relevan dalam administrasi publik karena menentukan bagaimana pengetahuan tentang kebijakan dan praktik publik diperoleh. Menurut Setiawan (2021), epistemologi administrasi publik melibatkan metode ilmiah yang digunakan dalam merancang kebijakan, melakukan evaluasi, dan memastikan implementasi kebijakan berdasarkan data dan analisis yang akurat. Pendekatan epistemologis ini sangat penting untuk mencegah pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada intuisi atau kepentingan politik.

c. Aksiologi Administrasi Publik

Aksiologi membahas nilai-nilai dan prinsip moral yang menjadi dasar tindakan. Dalam administrasi publik, aksiologi membantu menentukan standar etika dan nilai yang harus diterapkan oleh administrator publik. Fauzan (2019) menyatakan bahwa keadilan, transparansi, dan akuntabilitas adalah nilai-nilai utama yang harus dipegang oleh administrasi publik. Penerapan nilai-nilai ini menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

2. Filsafat sebagai Dasar Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dalam administrasi publik sering kali melibatkan dilema etis dan nilai yang saling bertentangan. Dalam hal ini, filsafat memberikan panduan untuk mempertimbangkan berbagai faktor secara holistik. Contohnya,

prinsip utilitarianisme dapat digunakan untuk menilai apakah kebijakan tertentu memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat luas. Sebaliknya, pendekatan deontologis menekankan pentingnya tindakan berdasarkan aturan dan prinsip, terlepas dari konsekuensinya.

Thoha (2022) juga menyoroti bahwa filsafat membantu administrator publik untuk memahami pentingnya keseimbangan antara efisiensi dan keadilan dalam kebijakan publik. Dengan panduan filosofis, administrator dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya efektif tetapi juga etis dan inklusif.

3. Implementasi Nilai Filosofis dalam Administrasi Publik

Penerapan nilai filosofis dalam administrasi publik dapat dilihat dalam berbagai aspek, seperti:

a. Keadilan dan Kesetaraan

Administrasi publik bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara menerima perlakuan yang adil dan setara. Nilai keadilan ini berasal dari pemikiran filsafat moral yang menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam kebijakan publik.

b. Transparansi dan Akuntabilitas

Filosofi transparansi menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam proses pemerintahan. Administrasi publik yang transparan memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan mengevaluasi kebijakan yang dijalankan.

c. Keberlanjutan Kebijakan Publik

Filsafat juga berperan dalam memastikan bahwa kebijakan publik tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap generasi mendatang. Prinsip ini relevan dalam isu-isu seperti perubahan iklim dan pengelolaan sumber daya alam.

4. Tantangan Filosofis dalam Administrasi Publik

Meskipun filsafat menawarkan panduan yang berharga, ada tantangan dalam mengintegrasikannya ke dalam administrasi publik, seperti:

- a. **Konflik Nilai:** Nilai-nilai seperti efisiensi, keadilan, dan kebebasan sering kali bertentangan dalam praktik administrasi publik.
- b. **Keterbatasan Sumber Daya:** Implementasi nilai filosofis sering kali terhambat oleh keterbatasan anggaran dan kapasitas organisasi.
- c. **Perubahan Sosial dan Politik:** Dinamika sosial dan politik yang cepat menuntut administrasi publik untuk terus menyesuaikan pendekatan filosofis mereka.

Kesimpulan

Hubungan antara filsafat dan administrasi publik sangat erat dan saling melengkapi. Filsafat menyediakan kerangka konseptual yang membantu memahami hakikat, sumber pengetahuan, dan nilai-nilai yang mendasari praktik administrasi publik. Dengan integrasi yang baik antara keduanya, diharapkan administrasi publik dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan etis dalam melayani masyarakat.

C. Urgensi Filsafat dalam Kajian Administrasi Publik

Filsafat, sebagai disiplin yang mengeksplorasi pertanyaan mendasar tentang eksistensi, pengetahuan, dan nilai, memiliki peran krusial dalam pengembangan dan praktik administrasi publik. Integrasi filsafat dalam administrasi publik tidak hanya memperkaya pemahaman teoretis tetapi juga meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan.

1. Landasan Teoretis dan Konseptual

Filsafat menyediakan kerangka konseptual yang mendasari berbagai teori dan praktik dalam administrasi publik. Melalui pendekatan ontologis, epistemologis, dan aksiologis, filsafat membantu mengidentifikasi hakikat, sumber pengetahuan, dan nilai-nilai yang relevan dalam administrasi publik. Menurut

Fauzan (Fauzan, 2017), pemahaman ontologis dalam administrasi publik mencakup studi tentang struktur, fungsi, dan proses dalam organisasi publik serta interaksi antara pemerintah dan masyarakat.

2. Pengambilan Keputusan yang Berbasis Etika

Integrasi filsafat dalam administrasi publik memastikan bahwa pengambilan keputusan didasarkan pada pertimbangan etis yang mendalam. Etika administrasi publik menekankan pentingnya nilai-nilai seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tindakan dan kebijakan. Thoha (2022) menyoroti bahwa penerapan nilai-nilai etika dalam administrasi publik membantu mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang, serta membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.

3. Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik

Pendekatan filosofis dalam administrasi publik mendorong analisis kritis terhadap kebijakan yang ada, sehingga memungkinkan perbaikan dan inovasi yang berkelanjutan. Dengan memahami dasar-dasar filosofis, para pembuat kebijakan dapat merancang program yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku. Setiawan (2021) menekankan bahwa epistemologi dalam administrasi publik mencakup metode ilmiah yang digunakan dalam merancang kebijakan, melakukan evaluasi, dan memastikan implementasi kebijakan berdasarkan data dan analisis yang akurat.

4. Pengembangan Kapasitas Profesional

Studi filsafat dalam administrasi publik juga berkontribusi pada pengembangan kapasitas profesional para administrator. Dengan pemahaman filosofis yang kuat, mereka dapat menghadapi tantangan kompleks dalam lingkungan kerja, mengambil keputusan yang bijaksana, dan beradaptasi dengan perubahan sosial dan politik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa administrasi publik tetap relevan dan efektif dalam melayani masyarakat.

5. Respons terhadap Tantangan Global

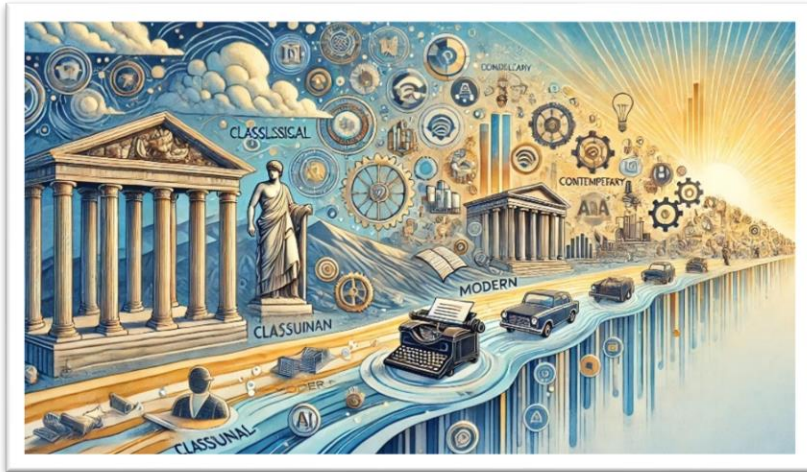
Dalam era globalisasi, administrasi publik dihadapkan pada berbagai tantangan baru, seperti isu lingkungan, hak asasi manusia, dan teknologi informasi. Pendekatan filosofis memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap isu-isu tersebut, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih komprehensif dan berkelanjutan. Dengan demikian, filsafat berperan penting dalam mempersiapkan administrasi publik untuk menghadapi dinamika global yang terus berkembang.

Kesimpulan

Urgensi filsafat dalam kajian administrasi publik terletak pada kemampuannya untuk menyediakan landasan teoretis, membimbing pengambilan keputusan etis, meningkatkan kualitas kebijakan, mengembangkan kapasitas profesional, dan merespons tantangan global. Oleh karena itu, integrasi filsafat dalam pendidikan dan praktik administrasi publik sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

BAB 2

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PEMIKIRAN ADMINISTRASI PUBLIK



Gambar 2 Ilustrasi Perkembangan Pemikiran
Administrasi Publik

A. Pemikiran Administrasi Publik di Era Klasik

Era klasik dalam administrasi publik, yang berkembang pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, menandai fase penting dalam evolusi teori dan praktik administrasi. Periode ini ditandai oleh upaya sistematis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi publik melalui pendekatan ilmiah dan birokratis (Thoha, 2022).

1. Latar Belakang Sejarah

Revolusi Industri membawa perubahan signifikan dalam struktur sosial dan ekonomi, yang menuntut peningkatan efisiensi dalam organisasi, termasuk sektor publik. Kebutuhan akan sistem administrasi yang lebih terstruktur dan efisien mendorong lahirnya berbagai teori dan praktik yang menjadi dasar administrasi publik klasik (Setiawan, 2021).

2. Teori Manajemen Ilmiah

Frederick W. Taylor, melalui karyanya *The Principles of Scientific Management* (1911), memperkenalkan konsep manajemen ilmiah yang menekankan analisis ilmiah terhadap pekerjaan untuk meningkatkan produktivitas. Pendekatan ini melibatkan studi waktu dan gerak, standarisasi tugas, dan seleksi serta pelatihan pekerja yang tepat. Prinsip-prinsip Taylor memengaruhi praktik administrasi publik dengan menekankan efisiensi dan rasionalitas dalam operasi pemerintah (Fauzan, 2017).

3. Teori Administrasi Klasik

Henri Fayol, seorang insinyur pertambangan Prancis, mengembangkan teori administrasi yang menyoroti fungsi-fungsi manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengendalian. Fayol juga mengemukakan 14 prinsip manajemen, termasuk pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan komando, dan kesatuan arah. Prinsip-prinsip ini memberikan kerangka kerja bagi struktur dan operasi organisasi publik (Setiawan, 2021).

4. Model Birokrasi Weberian

Max Weber, seorang sosiolog Jerman, memperkenalkan konsep birokrasi sebagai bentuk organisasi yang ideal untuk administrasi publik. Ciri-ciri birokrasi menurut Weber meliputi hierarki yang jelas, pembagian kerja, aturan dan prosedur formal, impersonalitas, serta seleksi dan promosi berdasarkan kualifikasi. Weber menekankan bahwa birokrasi memberikan rasionalitas, prediktabilitas, dan efisiensi dalam administrasi publik (Thoha, 2022).

5. Penerapan di Indonesia

Di Indonesia, prinsip-prinsip administrasi publik klasik mulai diterapkan pada masa kolonial Belanda dan terus berkembang setelah kemerdekaan. Struktur birokrasi yang hierarkis dan formal menjadi ciri khas administrasi publik Indonesia. Namun, tantangan seperti korupsi, nepotisme, dan inefisiensi menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip klasik belum sepenuhnya efektif (Fauzan, 2017).